

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum dari penggunaan kesaksian anak tanpa disumpah dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia. Fenomena pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan kesaksian. Anak sebagai korban sering kali merupakan saksi kunci dalam kasus ini, namun keterbatasan usia dan pemahaman mereka menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses hukum. KUHP mengatur bahwa kesaksian anak di bawah umur dapat diterima tanpa sumpah, dengan pertimbangan bahwa anak-anak mungkin belum mampu memahami makna sumpah secara utuh. Implikasi hukum dari ketentuan ini perlu ditinjau untuk memastikan keadilan bagi korban serta kepastian hukum bagi terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis terhadap pasal-pasal KUHP yang relevan serta studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesaksian anak tanpa disumpah diakui, tetap diperlukan mekanisme tambahan untuk menilai kredibilitas dan keakuratan kesaksian tersebut. Hal ini mencakup penggunaan ahli psikologi anak dalam proses penyidikan dan persidangan, serta perlindungan khusus bagi anak sebagai saksi. Kesimpulannya, regulasi ini memerlukan penguatan dari segi implementasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban terpenuhi tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kesaksian anak dan revisi aturan untuk menambahkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: kesaksian anak, tanpa sumpah, implikasi hukum.

ABSTRACT

This research discusses the legal implications of the use of child testimony without being sworn in in cases of criminal acts of child molestation, viewed from the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. The phenomenon of child molestation is a serious crime that requires special handling, especially in terms of collecting evidence and testimony. Children as victims are often key witnesses in these cases, but their limited age and understanding create challenges in the legal process. The Criminal Procedure Code regulates that the testimony of minors can be accepted without an oath, with the consideration that children may not be able to understand the full meaning of the oath. The legal implications of this provision need to be reviewed to ensure justice for victims and legal certainty for the defendant.

This research uses normative juridical methods with an analytical approach to relevant KUHAP articles and related case studies. The research results show that even if children's unsworn testimony is acknowledged, additional mechanisms are still needed to assess the credibility and accuracy of the testimony. This includes the use of child psychology experts in the investigation and trial process, as well as special protection for children as witnesses. In conclusion, this regulation requires strengthening in terms of implementation to ensure that the rights of children as victims are fulfilled without ignoring the rights of the defendant. The proposed recommendations include increasing the capacity of law enforcement officials in handling children's testimony and revising regulations to add more comprehensive legal protection for children in the criminal justice system.

Key words: *children's testimony, without oath, legal implications.*